

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Dilihat dari Kinerja keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dapat dikatakan cukup baik dengan skala >100%. Dilihat dari Analisis varians kurang baik, pertumbuhan pendapatan daerah dikatakan positif sebesar 6% dan dilihat dari aspek rasio keuangan daerah, rasio kemandirian dikatakan rendah sekali dengan skala 11%, dilihat dari rasio derajat desentralisasi dikatakan sangat rendah dengan skala 10%. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan skala 87%, dan dilihat dari rasio efektivitas dikatakan sangat efektif dengan skala 101%.
2. Dilihat dari segi belanja daerah kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dikatakan sudah baik namun perbedaannya terjadi pada tidak adanya standar pada proporsi belanja daerah. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja daerah dikatakan positif (peningkatan) sebesar 4%. Selain itu dari aspek keserasian belanja daerah dilihat dari rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung rata-rata sebesar 84% dan 68%. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah melakukan efisiensi belanja daerah dengan rata-rata sebesar 93%.

Dilihat dari aspek pembiayaan, analisis penggunaan SiLPA pada anggaran SiLPA tahun 2016-2020 adalah Rp. 0.00. . Sedangkan analisis penggunaan SiLPA pada realisasi SiLPA tahun 2016-2020 pemerintah daerah dinilai negatif karena pemerintah mengalami defisit anggaran.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Barat, karena mempunyai dampak yang besar, tidak hanya bagi Pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Potensi tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga perdagangan. Jika Pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, maka pajak yang merupakan penopang utamadalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

2. Pemerintah kabupaten Sumba Barat harus memperhatikan proporsi belanja langsung agar memiliki dampak dalam pembangunan di daerah.

3. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan ataupun mengalihkan SiLPA untuk kepentingan masyarakat yaitu lebih kepada pembangunan fasilitas-fasilitas umum di daerah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Banga, Wempy, 2017, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol 5, No. 2, Desember.

(DAK) terhadap *Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera*.

(PAD), *Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus* 2010.

Hakim, Mochammad Faishal. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2010-2016*. Universitas Islam Yogyakarta.

<https://www.djpk.kemenkeuangan.go.id> tahun 2022.

Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN : Yogyakarta.

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres : Yogyakarta.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN : Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Maryanti, ulfi dan Endrawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah*.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 164 ayat 1 tentang Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Mokodompli, Paramitha Sandy (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Mutiha, Arhaigan H. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor tahun 2010-2014*. Universitas Indonesia, h.mutiha@ui.ac.id.

- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan daerah,
- Permendagri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015: Jakarta.
- Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.
- Sijabat, Mentari Yosephen. (2012) *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Universitas Brawijaya Malang.
- Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Keuangan Daerah.
- Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widjaja. HAW. 2014. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Winarna, Jaka. 2010. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Journal of Rural And Development volume 1 No.2*.
- Yulistiana Devi, 2018, *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru*. Skripsi Jurusan Akuntansi, STIE PANCASETIA. Banjarmasin.
- Zuhri, Muhammad. (2014) *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kaur*. i Universitas Dehasen Bengkulu.